

BAB I

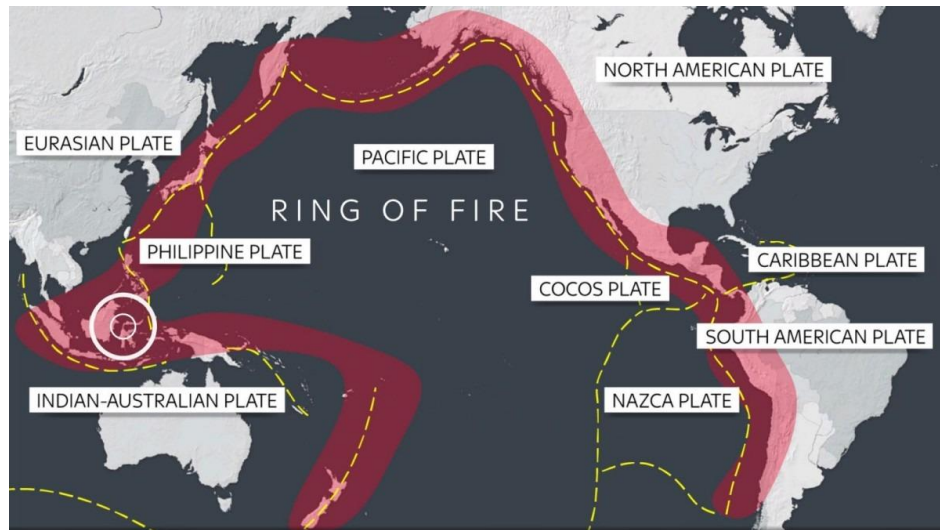
PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Berdasarkan data dari BIG (Badan Informasi Geospasial) pada Tahun 2013, Indonesia memiliki 13.466 pulau. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia yaitu dengan luas daratan 1.922.570 Km² (37,1%), dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 Km² (62,9%), serta Indonesia mempunyai luas wilayah yaitu 5.180.053 Km², sedangkan panjang garis pantainya kurang lebih adalah 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia itu sendiri terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia termasuk negara yang mempunyai risiko tinggi terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan pergerakan tanah atau tanah longsor.

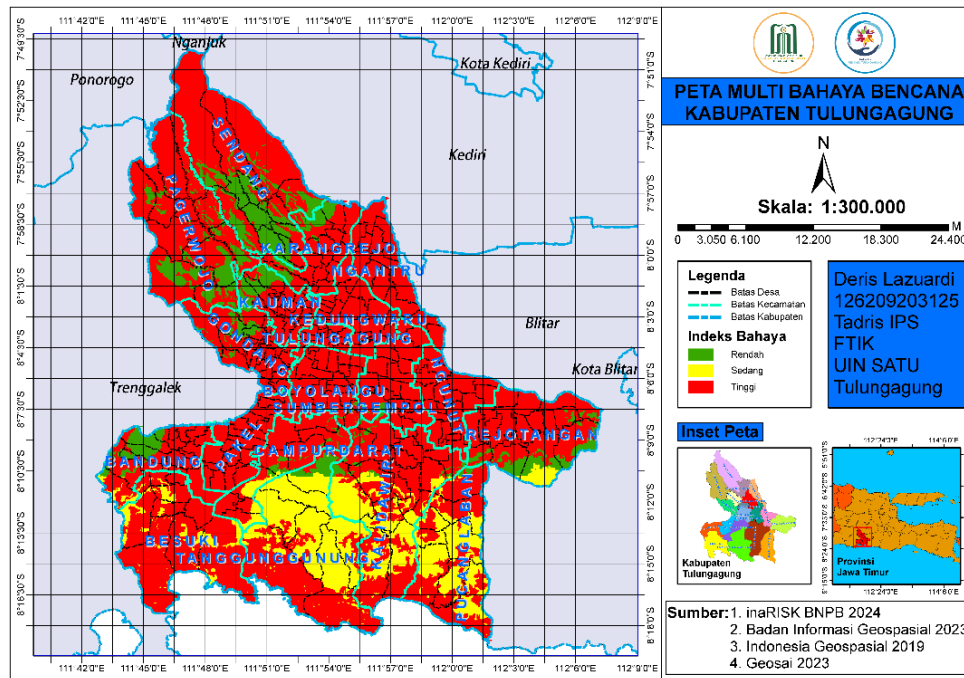
Indonesia itu sendiri letak wilayahnya berada di garis khatulistiwa dan berbentuk kepulauan. Oleh sebab itu, letak dan bentuk Indonesia tersebut menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi, antara lain seperti banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi, serta kebakaran lahan dan hutan. Fenomena perubahan iklim menjadi salah satu faktor penyebab maraknya bencana hidrometeorologi.²

² Akhmad Taufan Maulana dan Andriansyah, "Mitigasi Bencana di Indonesia", *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 10, (2024), hal. 3997.



Gambar 1.1. Peta *Ring of Fire* (Sumber: its.ac.id, 2021)

Wilayah Indonesia itu sendiri berada pada *Pacific Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik. Hal tersebut menyebabkan rentan akan risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan tsunami. *Pacific Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik itu sendiri merupakan jalur yang sering terjadi akan bencana gempa bumi dan jalur tersebut yaitu berada di sepanjang Samudra Pasifik yang dimana terdapat gunung-gunung berapi aktif. Indonesia itu sendiri terdapat sekitar 13% gunung berapi dari total yang ada di dunia, yaitu terdiri dari 500 gunung berapi tidak aktif dan 129 gunung berapi aktif, dari total gunung berapi tersebut sekitar 60% memiliki potensi letusan yang cukup besar. Selain itu, daerah yang terdapat gunung berapi tersebut memiliki permukaan yang berbentuk tapal kuda yang luas wilayahnya sepanjang 40.000 Km², hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

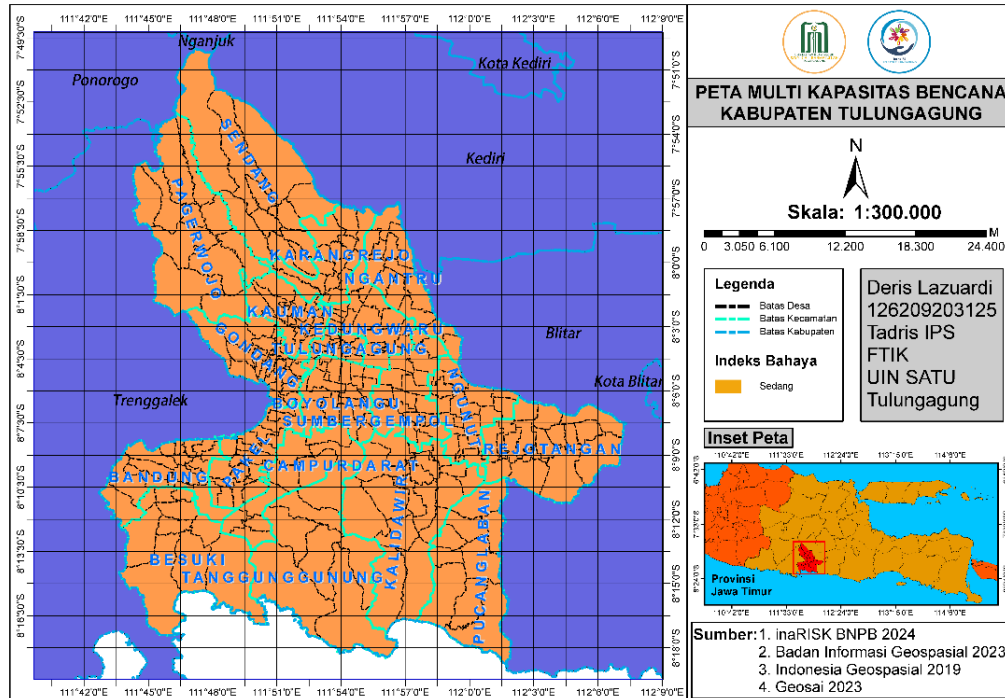


Gambar 1.2. Peta Multi Bahaya Bencana Kabupaten Tulungagung
(Sumber: Penulis, 2024)

Berdasarkan peta multi bahaya bencana, Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan wilayahnya terindeks bahaya dengan status tinggi dan beberapa wilayah yang terindeks status sedang serta yang paling sedikit yaitu terindeks status rendah, hal tersebut bisa dilihat dari peta diatas (Gambar 1.2) yang diambil dari data inaRisk BNPB Tahun 2024, kemudian peneliti mengelolanya menggunakan aplikasi ArcGis (ArcMap). Peta multi bahaya bencana Kabupaten Tulungagung diatas menunjukkan bahwasannya hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Tulungagung berpotensi rawan bahaya bencana.

Pemetaan multi-bahaya itu sendiri merupakan kombinasi bahaya, termasuk bahaya alam dan bahaya yang disebabkan oleh aktivitas manusia. *United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* mendefinisikan bahwa pemetaan multi-bahaya itu sendiri sebagai fenomena yang

berpotensi menyebabkan kerusakan harta benda, penurunan kualitas lingkungan, kerugian sosial dan ekonomi, bahkan kematian.³



Gambar 1.3. Peta Multi Kapasitas Bencana Kabupaten Tulungagung
(Sumber: Penulis, 2024)

Berdasarkan peta multi kapasitas bencana Kabupaten Tulungagung yang terlampir diatas yaitu pada gambar 1.3, wilayah Kabupaten Tulungagung keseluruhan wilayahnya terindeks status sedang. Melihat indeks status peta multi kapasitas bencana di Kabupaten Tulungagung yang sudah diketahui hasilnya diatas (Gambar 1.3), menunjukkan bahwasannya pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kembali terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, terutama di dunia pendidikan atau sekolah, sebab Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi terhadap bangunan sekolah, sehingga pendidikan ataupun informasi yang terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan sekolah menjadi

³ Sisdani Agung Dewandaru dkk, "Pemetaan Multi Bencana Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Malang Raya)", (Doctoral Dissertation, ITN Malang, 2018), hal. 1.

sangat penting, sedangkan kapasitas bencana di Kabupaten Tulungagung terindeks status sedang.

Kapasitas itu sendiri merupakan kemampuan daerah dan juga masyarakat dalam tindakan untuk mengurangi potensi kerugian atau ancaman akibat bencana secara terorganisir, terpadu, dan terencana, sedangkan peta bencana multi kapasitas itu sendiri merupakan peta yang menggambarkan tingkat kemampuan beberapa daerah dan/atau beberapa komunitas untuk menghadapi dan/atau pulih dari bencana.⁴ Peta multi bencana baik multi bahaya bencana dan multi kapasitas bencana diatas menampilkan informasi indeks status bencana di Kabupaten Tulungagung ke dalam 3 kelas yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi (Gambar 1.2 dan 1.3).

Proses pembuatan peta yang menggambarkan potensi dampak negatif suatu bencana, seperti kerugian material dan nonmaterial, di suatu wilayah dikenal dengan istilah *multi-disaster mapping* atau pemetaan multi bencana. Sebuah peta, yang sering disebut sebagai pemetaan multi bencana dapat digunakan untuk menggambarkan gagasan beberapa bencana. Peta jenis ini dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah utama yang dimana satu atau lebih bencana lebih mendominasi kejadian bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Peneliti mengelola dan menampilkan data multi bencana baik multi bahaya bencana dan multi kapasitas bencana supaya mengetahui bahwasannya wilayah-wilayah di Kabupaten Tulungagung perlu diwaspadai akan bencana. Peneliti

⁴ Rahma Hayati dkk, "Penilaian Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Berdasarkan Aspek Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali", *Jurnal Geografi*, Vol. 16, No. 2, (2019), hal. 107.

memperoleh data tersebut dari inaRisk BNPB 2024, yang kemudian data raster tersebut peneliti kelola menggunakan aplikasi ArcGIS (ArcMap).

Melihat kondisi diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung wilayahnya rawan akan bencana. Karena bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta berdampak pada semua orang dan juga bencana sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Oleh sebab itu, maka penting untuk meningkatkan kesadaran akan segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana tersebut sejak dini dan untuk mencapai budaya keselamatan melalui rutinitas dan kesiapsiagaan pencegahan bencana, pola pikir manusia harus berubah.

Dampak adanya reformasi pendidikan kebencanaan pola pikir masyarakat akan mampu berubah sehingga selalu mengedepankan keselamatan dari suatu bencana dan senantiasa sadar dan peduli terhadap bencana. Bencana mempunyai dampak yang paling memprihatinkan pada kelompok usia anak. Anak-anak tergolong rentan karena memerlukan perhatian ekstra agar dapat memahami strategi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Siswa atau peserta didik sangat rentan dalam menghadapi bencana karena kesadaran mereka yang terbatas terhadap ancaman di lingkungan mereka, sehingga membuat mereka tidak siap menghadapi bencana. Hal ini menunjukkan perlunya mendidik siswa atau peserta didik terkait bencana dan pengurangan risiko bencana sejak dini agar mereka dapat memahami bencana yang mengancam wilayah mereka. Siswa atau peserta didik jauh lebih rentan bilamana dibandingkan orang dewasa. Pendidikan bencana harus dimulai sejak dini karena pemahaman tentang bencana dapat memungkinkan generasi muda untuk berkontribusi dalam penerus

sebagai peran penting untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga masyarakat itu sendiri.⁵

Dampak bencana di satuan pendidikan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.4. Ilustrasi Dampak Bencana di Satuan Pendidikan
(Sumber: INEE, 2020)

Dilihat pada ilustrasi di atas, bencana tersebut telah menyebabkan terganggunya sistem dan jadwal pendidikan. Pendidikan dalam situasi darurat harus tetap menjadi prioritas utama karena merupakan hak siswa atau peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhannya akan perlindungan fisik, psikologis, perkembangan, dan kognitif. Hak ini berlaku bagi semua orang, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimana “setiap orang berhak memperoleh pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam melaksanakan

⁵ Lativa Qurrotaini dkk, “Edukasi Tanggap Bencana melalui Sosialisasi Kebencanaan sebagai Pengetahuan Anak terhadap Mitigasi Bencana Banjir”, *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2022), hal. 37-38.

penanggulangan bencana, baik dalam keadaan tidak terjadi bencana maupun dalam keadaan terjadi bencana”.

Melihat dari kesimpulan di atas, bahwasannya wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan daerah rawan terhadap bencana. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekolah tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di sekolah. Karena siswa atau peserta didik rentan akan risiko bencana apalagi pola pikir siswa atau peserta didik dalam menghadapi bahaya bencana di lingkungan sekolah dibanding orang dewasa. Hal tersebut, dalam upaya untuk melakukan kebutuhan terkait dengan mendorong sekolah untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan program satuan pendidikan aman bencana dan dengan melibatkan anak-anak secara aktif dalam pengimplementasikan program satuan pendidikan aman bencana, agar program tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

Tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, salah satunya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana melalui pendidikan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa upaya untuk mengurangi risiko bencana harus disertai dengan pendidikan dan untuk meningkatkan kesiapan sekolah, salah satu programnya adalah satuan pendidikan aman bencana. Partisipasi seluruh warga atau masyarakat sekolah sangat menentukan keberhasilan program satuan pendidikan aman bencana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pada Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana, maka program satuan pendidikan aman bencana

dikembangkan sebagai hasil upaya kolaboratif untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di sektor pendidikan. Tujuan dari program satuan pendidikan aman bencana adalah untuk melindungi warga atau masyarakat sekolah dari dampak buruk bencana.⁶

Kerangka kerja keamanan sekolah komprehensif (*comprehensive school safety*) atau disingkat CSS dalam upaya penanggulangan risiko bencana sesuai dengan keamanan sekolah komprehensif (*comprehensive school safety*) meliputi fasilitas aman bencana, manajemen satuan pendidikan aman bencana, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Program pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan aman bencana di bidang sekolah disebut satuan pendidikan aman bencana. Program tersebut berupaya untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan risiko terjadinya bencana di sekolah atau madrasah, maka kegiatan satuan pendidikan aman bencana diharapkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum.⁷

SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan program satuan pendidikan aman bencana, yang dibentuk oleh pihak BPBD Provinsi Jawa Timur, yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2023, hal tersebut berdasarkan penetapan yang telah di tanda tangani oleh Kepala Sekolah atau dilihat dari tanda tangan pada Struktur Organisasi Tim Siaga Bencana Sekolah (TSBS) SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, peneliti

⁶ Gogot Suharwoto dkk, *Modul 1 Pilar 1-Fasilitas Sekolah Aman UNICEF*, (Jakarta: BPKLN Kemendikbud dan Setjen Kemdikbud, 2015), hal. 7.

⁷ Rusdi Kasman, "Bimbingan Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Pasca Bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala", *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 2, No. 1, (2019), hal. 68.

memilih lokasi tersebut karena sekolah tersebut telah melaksanakan program satuan pendidikan aman bencana dan masih berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Oktober 2023, peneliti mendapatkan sebuah informasi tentang program satuan pendidikan aman bencana yang telah dilaksanakan atau diimplementasikan oleh pihak SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Peneliti melakukan penelitian mendalam pada tanggal 2 November 2023 sampai 3 Mei 2024.

Peneliti mengambil informasi wawancara dengan melibatkan informan yaitu Bapak Krysna Yudha Maulana, S.Pd., sebagai Tim program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan salah satu perwakilan yang ikut dalam sosialisasi satuan pendidikan aman bencana dari BPBD Kabupaten Tulungagung dan juga sosialisasi serta simulasi dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan pembentukan program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Peneliti juga mengambil informasi wawancara dengan melibatkan informan yaitu Bapak Sudarwanto, yang dimana beliau sebagai Waka Kesiswaan dan juga Ketua Tim Siaga Bencana Sekolah atau Program SPAB di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan mengambil informasi wawancara dengan melibatkan informan yaitu siswa atau peserta didik SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta pihak sekolah lainnya. Peneliti juga melakukan observasi dengan menggunakan metode pencatatan behavioral checklist, hal tersebut agar peneliti bisa melihat kondisi langsung terkait SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan menjadi tolak ukur, apakah sudah sesuai standar

pilar-pilar terkait program SPAB. Peneliti juga mengambil informasi wawancara dengan melibatkan informan yaitu salah satu pihak BPBD Kabupaten Tulungagung yang juga menangani program satuan pendidikan aman bencana di Kabupaten Tulungagung, guna memperkuat data penelitian.

Bapak Krysna Yudha Maulana, S.Pd., menjelaskan tentang tiga pilar sekolah aman yang komprehensif, bahwasannya fasilitas sekolah yang aman terkait pintu-pintu yang ada sekolah, baik ruang kelas maupun kantor yaitu pintu yang mengarah keluar bukan mengarah ke dalam, adanya penanda pencegahan di dinding-dinding sekolahan, adanya jalur evaluasi, adanya titik kumpul yang apabila ada bencana masyarakat sekolah yang ada di tempat kejadian baik pendidik maupun peserta didik bisa berkumpul di titik kumpul tersebut. Beliau juga menjelaskan terkait masalah-masalah dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa masalah-masalah tersebut antara lain yaitu pemahaman peserta didik terkait program satuan pendidikan aman bencana dan juga pemahaman terkait pengetahuan tentang kebencanaan baik mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, permasalahan atau hambatan mengenai koordinasi dengan pihak pembentuk program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan permasalahan mengenai beberapa pilar yang dirasa masih ada yang belum terlaksana.

Peneliti mempertimbangkan sejumlah permasalahan yang diangkat di atas, dengan mempertimbangkan penelitian terkait yang telah dilakukan oleh orang lain. Misalnya dalam penelitiannya yang berjudul “Mitigasi Bencana Melalui Program Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Malang”, yang ditulis oleh

Deri Fikri Haikal, Yana S. Hijri, dan Muhammad Kamil pada Tahun 2021.⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, ketika program sekolah pendidikan aman bencana dilaksanakan, warga atau masyarakat sekolah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi bencana melalui tahap diseminasi yang meliputi sosialisasi, dan visualisasi, serta simulasi bencana.

Selain itu, terdapat tahap monitoring untuk mengetahui sejauh mana output disampaikan secara efektif kepada siswa atau peserta didik dan evaluasi program yang berhubungan dengan mengukur kedalaman pemahaman siswa atau peserta didik setelah penerapan program sekolah pendidikan aman bencana tersebut. Namun konsep dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang terhadap penerapan sekolah pendidikan aman bencana hanya sekadar sosialisasi program tersebut kepada beberapa sekolah. Sasaran tersebut sesuai dengan rancangan program yang direncanakan, yaitu terdiri dari 4 sekolah selama setahun. Meskipun rancangan struktur program sosialisasi serupa dalam hal visualisasi, dan diseminasi, serta simulasi, namun konsep pelaksanaannya berbeda.

Ika Nur Oktafiani dan Ananto Aji, pada Tahun 2019 juga melakukan penelitian sebelumnya mengenai “Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri Padureso Kabupaten Kebumen”.⁹ Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Tingkat pengetahuan siswa masih tergolong rendah dan perlu perbaikan pada sejumlah indikator; b). Analisis terhadap implementasi program sekolah siaga bencana; dan c). Hambatan internal terhadap implementasi program

⁸ Deri Fikri Haikal dkk, “Mitigasi Bencana Melalui Program Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, Vol. 7, No. 1, (2021), hal. 86.

⁹ Ika Nur Oktafiani dan Ananto Aji, “Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri Padureso Kabupaten Kebumen”, *Edu Geography*, Vol. 7, No. 1, (2019), hal. 1.

meliputi pendanaan, kesadaran warga sekolah, belum adanya *SOP (standar operasional prosedur)*, dan kurikulum sekolah siaga bencana.

Peneliti lain yaitu oleh Fadhlurrahman Aryo Wicaksono, pada Tahun 2022 juga melakukan penelitian sebelumnya mengenai “Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹⁰ Temuan penelitian menunjukkan bahwa program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan belum dilaksanakan seefisien mungkin. Hal ini disebabkan meskipun BPBD Kabupaten Sleman mengharapkan agar menjadikan siswa atau peserta didik tangguh menghadapi bencana, namun tidak semua siswa atau peserta didik mendapatkan peningkatan kapasitas atau kemampuan ilmu kebencanaan dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya yaitu kurangnya konsistensi dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana yang telah dijalankan dan kenyataannya bahwa program ini hanya sekedar penyampaian materi, dan bukan pelaksanaan rutin. Hal tersebut merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan dan untuk mengatasi hambatan tersebut, diharapkan program satuan pendidikan aman bencana ini dilaksanakan dengan perencanaan yang lebih berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program satuan pendidikan aman bencana yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Peneliti dalam penelitian ini berharap mendapatkan informasi serta memecahkan masalah terkait pengetahuan siswa atau peserta didik

¹⁰ Fadhlurrahman Aryo Wicaksono dan Rico Paulus Sibuea, “Efektivitas Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, Vol. 4, No. 2, (2022), hal. 64.

mengenai program satuan pendidikan aman bencana, dan peneliti juga berharap mendapatkan informasi mendalam terkait implementasi program satuan pendidikan aman bencana yang telah diimplementasikan serta peneliti juga berharap mendapatkan informasi mendalam terkait faktor apa saja yang menghambat program satuan pendidikan aman bencana yang telah diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sejauh ini.

Setiap program dalam sebuah implementasi khususnya program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pastinya terdapat faktor penghambat terlaksananya kegiatan program satuan pendidikan aman bencana tersebut, bisa jadi kendala berasal dari dalam sekolah atau pun berasal dari luar sekolah (pihak pemerintah terkait penyelenggara) yang menyebabkan pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terganggu.

Maka dari itu, yang telah disebutkan diatas bahwasannya peneliti juga ingin mencari informasi terkait faktor penghambat dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan peneliti juga ingin mencari tahu terkait kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak sekolah dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana yang telah diterapkan atau diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan program satuan pendidikan aman bencana. Hal tersebut guna membantu pihak sekolah dan pemerintah dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi ini

dengan judul **“Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diutarakan di atas, maka identifikasi masalah tersebut adalah :

1. Kurangnya kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan program satuan pendidikan aman bencana.
2. Kurangnya pengetahuan siswa atau peserta didik mengenai program satuan pendidikan aman bencana yang telah diimplementasikan di sekolah.
3. Kurangnya komunikasi terkait kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak sekolah dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana yang telah diimplementasikan di sekolah.

C. PEMBATASAN MASALAH

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tetap pada topik, maka peneliti perlu memberikan batasan penelitian. Peneliti memfokuskan pada beberapa hal yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana yang telah diterapkan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.
2. Penelitian juga berfokus pada pengetahuan siswa terkait program satuan pendidikan aman bencana yang telah diterapkan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Penelitian juga ingin menganalisis faktor apa saja penghambat dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024?
2. Bagaimana pengetahuan siswa atau peserta didik mengenai program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024.
2. Untuk mengukur pengetahuan siswa atau peserta didik mengenai program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024.
3. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2024.

F. MANFAAT PENELITIAN

Uraian yang sudah diutarakan di atas mengenai fokus penelitian dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan informasi mendalam dan dapat memecahkan masalah terkait implementasi program satuan pendidikan aman bencana serta terkait pengetahuan siswa atau peserta didik mengenai program satuan pendidikan aman bencana dan juga terkait apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, guna membantu pihak sekolah dan pemerintah dalam memecahkan masalah.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca atau mereka yang membacanya dan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana program satuan pendidikan aman bencana yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2) Bagi Peneliti Lain

Menjadikan inspirasi atau sumber referensi atau sekaligus menjadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas atau melanjutkan penelitian ini untuk tujuan yang relevan.

3) Bagi Instansi Terkait

a. Bagi Pihak Sekolah

- a) Memberi informasi kepada masyarakat atau warga sekolah terkait implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- b) Meningkatkan program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, supaya program tersebut lebih baik lagi dari sebelumnya.

b. Bagi Siswa

- a) Meningkatkan pemahaman siswa atau peserta didik terkait implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- b) Menumbuhkan minat belajar siswa atau peserta didik dalam memahami mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana.
- c) Menumbuhkan kesadaran siswa atau peserta didik terhadap bencana.

c. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

- a) Sebagai bahan evaluasi terkait implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung selaku pembuat kebijakan program satuan pendidikan aman bencana.

d. Bagi Mahasiswa Pendidikan atau Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

- a) Sebagai sarana rujukan atau referensi baru tentang Ilmu Pengetahuan Sosial, terutama tentang program satuan pendidikan aman bencana.

- b) Supaya meningkatkan kepedulian Mahasiswa Pendidikan atau Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana di satuan pendidikan.

G. PENEGASAN ISTILAH

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”. Peneliti berpendapat bahwa sangat penting untuk mendefinisikan kata-kata secara konseptual dan operasional, supaya memastikan tidak adanya kesalahpahaman mengenai judul penelitian dan hal tersebut juga untuk memperjelas arah pembahasan:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan yang berfungsi untuk memajukan tujuannya. Kebijakan publik dapat diimplementasikan secara langsung melalui program atau secara tidak langsung melalui pengembangan kebijakan baru atau kebijakan yang merupakan turunan kebijakan. Kebijakan publik yang bersifat penjelas, yang juga dikenal sebagai peraturan pelaksanaan atau implementasi merupakan kebijakan atau implementasi yang perlu diberlakukan melalui peraturan daerah atau negara bagian. Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan

kebijakan publik lainnya termasuk di antara kebijakan yang dapat segera diberlakukan.¹¹

b. Program

Program merupakan sesuatu yang perlu dievaluasi pada akhir pelaksanaannya dan dijalankan secara berulang-ulang sehingga jangka waktu yang telah direncanakan. Program tersebut perlu diorganisasikan dengan baik, berapa pun lamanya program tersebut berlangsung. Tidak mungkin untuk membuat program secara sederhana atau sama sekali. Program itu sendiri perlu ditanggapi dengan serius dan diberikan pertimbangan yang cermat untuk menjamin bahwa tujuan tersebut tercapai secara efektif dan efisien.¹²

c. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan pendidikan aman bencana merupakan sebuah lembaga atau organisasi layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal tentang penanggulangan bencana. Satuan pendidikan aman bencana dalam bidang atau sektor pendidikan, mencakup upaya mitigasi, kesiapsiagaan bencana, pencegahan, pemulihan pascabencana, dan tanggap darurat bencana. Program satuan pendidikan aman bencana dirancang untuk membantu lembaga mitra atau satuan pendidikan dalam mengelola bencana dan mencegah dampaknya. Program ini didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB Nomor 4

¹¹ Joko Pramono, *“Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”*, (Kota Surakarta: Unisri Press, 2020), hal. 1-3.

¹² Aulya Fahma, *“Evaluasi Program Kelas Unggulan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”*, *Tesis*, FITK, Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2021), hal. 13.

Tahun 2012, yang menguraikan pedoman penyelenggaraan sekolah atau madrasah aman bencana.¹³

2. Secara Operasional

Adanya implementasi program satuan pendidikan aman bencana, diharapkan dapat menurunkan risiko bencana dan meningkatkan kesadaran akan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini. Satuan pendidikan didorong untuk terus meningkatkan pelaksanaan program dan pemerintah memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan yang melaksanakan program tersebut. Meskipun bencana memiliki pengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kehidupan individu, siswa atau peserta didik diharapkan memperoleh pendidikan yang tidak terpengaruh oleh bencana dan tersedianya tempat yang aman dari bencana saat mereka berada di lingkungan sekolah.

Upaya pengurangan risiko bencana diharapkan dapat terciptanya melalui akses pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan berbasis kurikulum. Selain itu, program satuan pendidikan aman bencana diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 33 Tahun 2019 yang menjamin penyediaan layanan pendidikan yang tidak terputus di satuan pendidikan yang terdampak bencana.

¹³ Masrizal dan Muhammad Iqbal, *“Panduan Satuan Pendidikan Aman Bencana”*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 35.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya menjamin koherensi dan kejelasan, kertas atau lembaran tersebut dibuat secara sistematis. Tujuan penulis atau peneliti adalah untuk memberikan kajian yang terorganisasi dengan baik terhadap subjek yang dibahas, dengan setiap bab mengikuti susunan yang telah direncanakan sebelumnya. Pendekatan ini akan memungkinkan diskusi yang lebih terarah, terstruktur, dan bermakna, yaitu merupakan suatu gambaran umum tentang sebuah penelitian skripsi.

Makalah penelitian ini terdiri dari wacana terstruktur, yang dikategorikan menjadi tiga bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian awal meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama (inti)

Bagian utama terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yakni:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini, berisi pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yaitu: (a) konteks penelitian, (b) identifikasi masalah, (c) pembatasan masalah, (d) fokus penelitian, (e) tujuan penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika pembahasan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini, membahas kerangka konseptual tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan investigasi, pengumpulan informasi, interpretasi data, menyusur alat wawancara dan observasi, serta memahami teori-teori yang berkaitan dengan berbagai faktor dalam penelitian ini secara khusus yaitu terkait program satuan pendidikan aman bencana, terutama yang berkaitan tentang implementasi program satuan pendidikan aman bencana di SMA Negeri 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bab II ini, terdiri dari tiga sub bab yaitu konteks penelitian, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini, penelitian meliputi metode penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab IV ini, memberikan gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilalui melalui proses analisis dan interpretasi oleh penelitian. Bab IV ini, terdiri dari deskripsi data, paparan data, dan temuan penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Bab V ini, merupakan uraian tentang fokus penelitian dan Bab V ini, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab V ini, juga memuat saran dari penulis atau peneliti tentang temuan penelitian.

f. BAB VI PENUTUP

Bab VI ini, berisi kesimpulan dari hasil temuan dalam penelitian, dan saran atau harapan peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan mampu melengkapi penelitian terdahulu serta mengharapkan adanya masukan atau pembaharuan penelitian di waktu mendatang.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini, berisi terkait beberapa lampiran yang didapat oleh peneliti, ketika peneliti dalam tahap penelitian berlangsung. Beberapa lampiran tersebut, antara lain yaitu hasil dokumentasi kegiatan seperti surat izin penelitian, instrumen wawancara, dan temuan-temuan lapangan, serta bukti langsung kegiatan penelitian.